

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita, penyebab utamanya kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga pada masa awal anak, dampaknya anak memiliki tinggi badan yang jauh lebih pendek dan wajah tampak lebih muda dibandingkan dengan balita seusianya, pertumbuhan anak yang melambat, pertumbuhan gigi terlambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya, pubertas terlambat, dan usia 8- 10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. (Setiaji, 2018).

Keadaan *stunting* menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 yaitu keadaan dimana hasil pengukuran panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) berada diantara - 3 deviasi (SD) sampai - 2 SD. dikatakan sangat pendek dimana hasil pengukuran PB/U atau TB/U dibawah - 3 SD.

Stunting pada balita perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan fisik, perkembangan mental dan status kesehatan pada anak. Studi terkini menunjukkan anak yang mengalami stunting berkaitan dengan prestasi di sekolah yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah dan pendapatan yang rendah saat dewasa. Anak yang mengalami stunting memiliki kemungkinan lebih besar tumbuh menjadi individu dewasa yang tidak sehat dan miskin. Stunting pada anak juga berhubungan dengan peningkatan kerentanan anak terhadap penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular serta peningkatan risiko *overweight* dan obesitas. Keadaan *overweight* dan obesitas jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit degeneratif.

Kasus stunting pada anak dapat dijadikan prediktor rendahnya kualitas sumber daya manusia suatu Negara. Keadaan stunting menyebabkan buruknya kemampuan kognitif, rendahnya produktivitas, serta meningkatnya risiko

penyakit mengakibatkan kerugian jangka panjang bagi ekonomi Indonesia.

Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat ini sudah diatur dalam peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/ MENKES/PB/VIII/2005. Peraturan bersama dua kementerian ini juga sesuai nawacita Indonesia Sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan pendekatan masyarakat yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2017.

Merujuk pada data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dinyatakan bahwa prevalensi balita mengalami stunting di Indonesia pada Tahun 2019 cenderung menurun dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 30,8% menjadi 27,7%, namun angka ini tetap tinggi. Untuk diketahui bahwa pada Tahun 2007 angka stunting di Indonesia mencapai 36,8%, pada Tahun 2010 mencapai 34,6%, pada Tahun 2013 mencapai 37,2%, dan pada tahun 2018 mencapai 30,8%. Sebagai perbandingan di Amerika pada Tahun 2010 angka stunting hanya mencapai 2,1%, untuk Jepang menjadi 7,1% pada Tahun 2014. Sedangkan Malaysia mencapai 17%, Thailand 16% dan Singapura 4% (Kemkes.go.id, 2020).

Meskipun menurun, tetapi faktanya angka persentase stunting di Indonesia saat ini masih berada di urutan ke-4 di Dunia. Prevalensi balita stunting di Indonesia pada Tahun 2019 yakni 27,7%. Jumlah yang masih jauh dari nilai standar WHO yang seharusnya dibawah 20%. Diketahui bahwa, saat ini alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan Tahun 2020 sebesar Rp 132,2 Triliun, naik dari alokasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp 123,1 Triliun. Namun anggaran tersebut tidak hanya dikelola oleh Kemenkes tapi juga K/L bidang kesehatan lainnya termasuk transfer ke daerah salah satunya adalah propinsi NTT.

Data Dinas Kesehatan Propinsi NTT menyatakan bahwa angka prevalensi balita stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam tiga tahun terus mengalami penurunan. Meski demikian, angkanya masih tinggi yaitu sebesar 27,5% dengan kasus meninggal sebanyak 57 orang. Data jumlah stunting pada Tahun 2018 sebesar 30,1% lalu di Tahun 2019 menurun menjadi 27,9%. Sementara hingga periode Agustus 2020 ini sebesar 27,5% (Dinas Kesehatan

Propinsi NTT, 2020). Dari 22 kabupaten/kota di Propinsi NTT, Kabupaten Kupang menjadi kabupaten dengan kasus stunting terbesar dengan persentase 44,1% pada Bulan Februari Tahun 2020. Target pemerintah Propinsi NTT adalah menurunkan prevalensi balita stunting ini sampai di bawah 15 sampai 10 persen dengan menekan jumlah balita stunting, wasting atau kekurangan gizi, dan underweight.

Sedangkan kasus stunting di Desa Baumata berdasarkan data Puskesmas Baumata dari tahun 2018 berjumlah 33, pada tahun 2019 berjumlah 33 dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan penderita stunting sebanyak 20 balita. Dari tahun 2018 kasus stunting tertinggi pada tahun 2020 di Desa Baumata dengan jumlah stunting hasil verifikasi 53 balita.

Pencegahan dan penanggulangan stunting membutuhkan upaya yang bersifat holistic dan saling terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 merupakan salah satu strategi dalam Scaling Up Nutrition (SUN) dengan melibatkan berbagai sektor yang harus disikapi dengan koordinasi yang kuat baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Diseminasi informasi dan advokasi kepada stakeholder dan pemangku kepentingan lain diberbagai lintas sektor pada tingkatan yang sama dan perlu dilakukan upaya pelatihan dan edukasi untuk jajaran struktural agar mampu menjelaskan dan melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Selanjutnya. Intervensi penting penguatan 1000 HPK yang menjadi bagian dari budaya di kehidupan sosial masyarakat, melakukan kursus singkat dalam pengetahuan dan pendidikan kepada ibu sebelum kehamilan atau sebelum menjadi pengantin (calon pengantin) sebagai bekal ibu dalam kehamilan untuk menjaga tumbuh kembang kognitif janin yang dimulai dari trimester pertama dalam pembentukannya (Aryastami, 2017).

Potensi Desa Untuk Penanganan Stunting. Penanganan stunting merupakan prioritas pembangunan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Gizi dan Ketahanan Pangan, Sesuai dengan UU tentang Desa, maka terhadap upaya penanganan stunting yang sudah menjadi prioritas nasional sangat memungkinkan bagi Desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dan yang bersifat skala desa melalui APBDes. Rujukan Belanja Desa untuk penanganan stunting diperkuat dengan telah dikeluarkannya Permendes No.

19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Permendes No 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 terkait Stunting.

Bab III Pasal 7 Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak.

Rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Baumata karena minimnya pengetahuan dan pemahaman ibu mengenai stunting mengakibatkan pola asuh yang kurang baik. Fakta yang seringkali terjadi pada anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan air susu ibu secara eksklusif, dan ketika berusia 6 bulan tidak menerima makanan pendamping air susu ibu.

Penderita stunting di Desa Baumata disebabkan ibunya yang berpendidikan rendah bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Pendidikan Ibu terhadap kejadian stunting di Desa Baumata

No	Pendidikan ibu	jumlah
1	Pendidikan Rendah (SD)	28
2	Pendidikan Sedang (SMP)	15
3	Pendidikan Menengah (SMA)	8
4	Pendidikan Tinggi (S1/D3)	3
Jumlah		53

Sumber : Kantor Desa Baumata Tahun 2020

Kesibukan orang tua bekerja menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting, karena mengakibatkan kurangnya memperhatikan asupan gizi anaknya, kesehatan anaknya dan pendidikan anaknya.

Dari latar belakang ataupun fenomena umum di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting di Desa Baumata yang memiliki penderita stunting. Karena itu penelitian ini diberi judul **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DI DESA BAUMATA.**

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatari terjadinya *Stunting* (gangguan pertumbuhan pada anak) di Desa Baumata?
2. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Stunting di Desa Baumata Kecamatan Taebenu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak penulis akan diteliti tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting di Desa Baumata.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting di Desa Baumata.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Mendorong masyarakat agar lebih memahami tentang konsep dari partisipasi, serta meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam

memahami partisipasi yang benar sehingga masyarakat lebih berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting yang terjadi Di Desa Baumata.

2. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti yang berkaitan dengan stunting, faktor- faktor penghambat dan pendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting Di Desa Baumata.

3. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pembaca dalam menjalankan model partisipasi dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti yang ingin meneliti masalah ini lebih lanjut.